

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latarbelakang Masalah

Pemerintah Kampung adalah penyelenggara urusan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Kepala kampung Dan Badan Permusyawaratan kampung (BPK) serta dibantu oleh Perangkat Kampung dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan ada istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatua Republik Indonesia

Berkaitan dengan ketentuan tersebut, hal ini mengisyaratkan bahwa dalam melaksanakan urusan rumah tangga kampung , melakukan pembinaan, pembangunan masyarakat, dan membina perekonomian kampung harus dapat dijalankan oleh aparatur kampung karena masyarakat kampung telah berkembang dengan berbagai kegiatan yang semakin membutuhkan aparatur

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Negara Nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah mengakui adanya otonomi yang dimiliki oleh Desa dan kepada kepala kampung dapat diberikan penugasan ataupun

pendelegasian dari pemerintah atau pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu. Oleh karena itu urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup : urusan pemerintahan yang telah ada berdasarkan hak asal usul desa; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa; tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota; dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada kampung .

Pelaksanaan pembangunan merupakan terpenting dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung dimana pada Pasal 78 ayat 1 mengatakan bahwa pembangunan kampung bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan sarana prasarana kampung , pengembangan potensi ekonomi desa serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Tentunya dalam pelaksanaan pembangunan menjadi tugas dari Kepala kampung dalam merealisasikan pembangunan yang akan dilaksanakan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 81 ayat 2 mengatakan pembangunan desa dilaksanakan oleh pemerintah kampung dengan melibatkan seluruh masyarakat kampung dengan semangat gotong royong.

Kinerja aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Pemerintah Pusat merupakan sesuai dengan daerah otonom wilayah administratif dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Otonomi Khusus di Papua. Karena menyelenggarakan pembangunan di wilayah merupakan hal yang

sangat luas, terjangkau dan tantangan besar yang diperlukan oleh masyarakat bahkan aparat/pegawai-pegawai yang mempunyai kompetensi dan berjiwa melayani dengan partisipasi memberikan perlengkapan pasilitas baru lainnya. Pada umumnya Sumber Daya Manusia (SDM), aparat yang handal dan mampu mengatasi kesulitan-kesulitan memecahan persoalan yang dialami masyarakat, baik itu masalah kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan dalam semua aspek secara nasional.

Kabupaten Puncak adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Januari 2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2008, bersama-sama dengan pembentukan 5 kabupaten lainnya di Papua. Peresmiannya dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada tanggal 21 Juni 2008. Kabupaten Puncak adalah hasil pemekaran dari Kabupaten Puncak Jaya.

Kampung Toegi adalah salah satu kampung dari 8 kampung yang berada di Distrik Ilaga Utara, Pelaksanaan pembangunan di desa togei Distrik Ilaga Utara tidak sesuai dengan harapan masyarakat Togei distrik ilaga utara dimana kepala kampung tidak mengikuti aturan dan mekanisme yang ada karena kepala kampung Togei tidak membuat struktur organisasi dalam merealisasikan pembangunan ditambah juga dengan alokasi dana desa yang diberikan tidak dimanfaatkan oleh pemerintah kampung Togei yang pada dasar dananya dimaksudkan untuk melaksanakan pembangunan desa tapi tidak ada pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah kampung Togei. Tentunya dalam

melaksanakan pembangunan peran kepala kampung sangat dibutuhkan dalam perencanaan, pengawasan, maupun evaluasi dari hasil pelaksanaan yang dilaksanakan oleh pihak penyelenggaraan pembangunan yang ada di kampung toegi distrik ilaga utara

Dari hasil pengamatan penulis juga lihat bahwa gambaran bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa di Kampung ini belum secara optimal berjalan efektif. Urusan pemerintahan yang merupakan tugas dan kewenangan pemerintah kampung seperti pembinaan kehidupan masyarakat, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah Kampung. Hasil prasurei juga menunjukkan bahwa penyelenggaraan pembangunan di Kampung Toegi belum secara optimal berjalan dan memberikan hasil yang efektif. Program program pembangunan sarana dan fasilitas umum yang ditetapkan seringkali tidak dapat dilaksanakan dan mencapai hasil yang diharapkan dan terlihat sia- sia.\

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kampung Toegi yang belum secara optimal berjalan dan mencapai hasil yang efektif tersebut setidaknya tidaknya dapat mengindikasikan masih rendahnya kinerja Kepala Kampung Toegi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung .

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis menngambil judul penelitian tentang “peran Kinerja Kepala kampung Dalam pelayanan public di Kampung Toegi Distrik Ilaga Ytara Kabupaten Puncak ”.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Kinerja Kepala Kampung Toegi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.
- b. Factor – factor apa saja yang menghambat penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Peneliti

- a. Untuk mengetahui Kinerja kepala kampung Toegi dalam penyelenggaraan Pemerintahan kampung Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.
- b. Untuk mengetahui factor yang menghambat penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak Manfaat penelitian

1.3.2. Manfaat Penelitian

a. Secara Akademis

Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Pemerintahan dalam kajian-kajian ilmiah yang berkaitan dengan Kinerja Kepala Kampung Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung secara khusus di Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan kemampuan Kinerja Kepala Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung Toegie Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak..

1.4. Definisi Konsep dan Operasional Indikator

1.4.1. Definisi Konsep

Untuk memahami konsep dalam penelitian ini, penulis memilih fokus penelitian pada dua konsep yang selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Konsep Kinerja Kepala Kampung

Kinerja Kepala Kampung dapat dimaknai sebagai keseluruhan aktivitas yang menggambarkan motivasi, situasi kerja dan disiplin kepala kampung dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai aparat kampung.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dipahami sebagai keadaan yang menjelaskan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dilihat melalui kegiatan pelayanan, pembangunan, dan pembedayaan masyarakat di Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.

1.4.2. Operasional Indikator

Operasional dari Dimensi Kinerja Kepala Kampung adalah :

- **Motivasi Kerja** dapat ditafsirkan sebagai sesuatu yang mendorong kepala Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
- **Situasi Kerja** diterjemahkan sebagai kondisi atau keadaan yang menjelaskan suasana tempat bekerja di Kantor Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.

- **Disiplin Kerja** dimaknai sebagai situasi yang menjelaskan semangat kerja Kepala Kampung dalam bekerja melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan dan mendorong pemberdayaan masyarakat di Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak.

Operasional dari **Dimensi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung** adalah

- **Pelayanan.**

Pelayanan merupakan salah satu fungsi dari Pemerintahan yang dimaknai sebagai keadaan yang menjelaskan aktivitas Pemerintah Kampung Toegi dalam menjalankan tugas dan fungsinya melayani masyarakat.

- **Pembangunan.**

Pembangunan dimaknai sebagai salah satu fungsi pemerintahan yang dimaknai sebagai keadaan yang menjelaskan aktivitas pemerintah dalam membangun baik secara fisik maupun non fisik di Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak.

- **Pemberdayaan masyarakat.**

Pemberdayaan masyarakat dimaknai sebagai salah satu aktivitas pemerintahan yang dimaknai sebagai keadaan yang menjelaskan aktivitas pemerintah dalam menggerakkan masyarakat kampung memanfaatkan potensinya.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Relevansi penelitian sebelumnya

Penulis sadari bahwa ada banyak peneliti sebelumnya yang pernah penulis tentang topik sejenis. Itu sebabnya untuk menghindari terjadinya duplikasi dan adanya indikasi plagiarisme maka penulis mencoba membandingkan judul penelitian ini dengan lima buah penelitian yang penulis anggap topiknya mirip sehingga penulis bisa mendapatkan posisi yang tepat (*standing position*) dari penelitian ini sehingga dapat dilanjutkan dan tidak mengandung unsur plagiat. Berikut adalah beberapa judul penelitian yang penulis jadikan perbandingan sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukam oleh E.A. Budiman (2022) dengan judul Peran Kinerja Kepala Kampung dalam Pelayanan Publik di Kampung Trikora ditinjau dari UU No. 6 tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang mempegaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis empiris adalah merupakan penelitian hukum lapangan yang mana peneliti secara langsung turun ke lapangan dan mengamati apa yang terjadi di lapangan dengan teknik wawancara dan menjawab permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang Kinerja Kepala Kampung Dalam Pelayanan

Publik DiKampung Trikora Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 2014 sedangkan penelitian yuridis normative dilakukan dengan menganalisis tentang substansi hukum yang mengarah pada system hukum, sehingga tidak terlepas dari normative analisis yang bertolak dari bahan hukum primer. Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik dan faktor yang mempengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di kampung Trikora yaitu faktor pendukung yaitu perangkat lunak dan perangkat keras dan untuk faktor penghambatnya yaitu masih kurangnya kemampuan kepala kampung dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, faktor lainnya yaitu terkait kedisiplinan jam kerja dan terakhir adalah dukungan pemerintah dalam hal memberikan pelatihan dan bimbingan teknis dalam hal pelayanan publik. (Budiman, Tamher, & Watkat, 2022)

2. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam menjalankan pembangunan desa dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Ngenyan Asa Barong Tongkok Kecamatan Kutai Barat. Jenis penelitian termasuk deskriptif kualitatif. Fokus utama penelitian mendefinisikan peran Kepala Indikator Kampung: tata kelola, pembangunan desa, pengembangan kehidupan ekonomi masyarakat, faktor penghambat kepala desa dalam

melaksanakan pembangunan di Kampung Ngenyan Asa kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Sedangkan sumber data yang diambil dari informed competent, di antaranya: Sekretaris Kampung, Staf/Karyawan Kantor Kampung Asa yang tugasnya terkait masalah penelitian yang sedang diselidiki dan masyarakat. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang dikembangkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pembangunan desa dan masyarakat dilakukan di balai desa. Terwujudnya demokrasi dalam unsur pemerintahan desa pemerintah desa. Kepala desa untuk mengawasi pelaksanaan aturan dan peraturan kepala desa. Kantor administrasi pemerintahan jarang buka dan sulit kepala desa di kampung halaman saya untuk ke temui jika ingin mengurus rumah sekretaris desa. Pembangunan Desa merupakan perubahan yang disengaja dari Kepala desa dan masyarakat di desa, berupa sarana dan prasarana yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai rencana kepala desa kepada masyarakat. Kehidupan ekonomi masyarakat dari segi tatanan ekonomi dan sosial sudah cukup baik, baik dari luar maupun dari dalam desa. Kepala desa merupakan motor penggerak pembangunan di bidang sosial dan ekonomi berarti adanya fungsi kepala desa menggerakkan masyarakat dalam melakukan sesuatu tindakan atau kegiatan untuk bersama-sama mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat dalam pembangunan (Doran, 2020)

3. Penelitian yang dilakukan oleh Djamil Hasim dengan judul Peran Kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kampung Paray Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor (2016) Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa kepala kampung dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. (Hasim, 2016)

Tabel 01

Relevansi Penelitian Sebelumnya

NO.	PENULIS	JUDUL PENELITIAN	TUJUAN PENELITIAN	METODE PENELITIAN	HASIL PENELITIAN	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN INI
1.	E.A. Budiman (2022)	Peran Kinerja Kepala Kampung dalam Pelayanan Publik di Kampung Trikora ditinjau dari UU No. 6 tahun 2014.	untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala kampung Trikora dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat dan untuk mengetahui Faktor Apa saja yang memengaruhi kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik yang di kampung Trikora di tinjau dari Undang-undang Nomor. 6 Tahun 2014.	yuridis normative	Hasil penelitiannya adalah bahwa kinerja kepala kampung dalam pelayanan publik di Kampung Trikora pada umumnya cukup baik, namun masih terdapat beberapa indikator yang belum sepenuhnya sesuai dengan pelaksanaan kinerja pemerintah kampung dalam pelayanan publik	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada Lokasi, Judul, Metode dan Hasil. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian mengukur kinerja kepala kampung dari aspek motivasi kerja, situasi kerja, disiplin kerja
2	(Doran, 2020)	Peran Kepala Desa dalam pembangunan di Kampung Ngenyan Asa Barong Tongkok Kecamatan Kutai Barat	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran kepala desa dalam menjalankan pembangunan desa dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa administrasi pembangunan desa dan masyarakat dilakukan di balai desa.	Perbedaannya dengan penelitian ini pada judul, lokasi, tujuan dan hasil. Dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah mengukur kinerja kepala kampung dari aspek motivasi kerja,

			menghambat kepala desa dalam melaksanakan pembangunan di Kampung Ngenyan Asa Barong Tongkok Kecamatan Kutai Barat			situasi kerja dan disiplin kerja dan penyelenggaraan pemerintahan kampung Toegi
3	Djamil Hasim (2016)	Peran Kepemimpinan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Kampung Paray Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor	Tujuan penelitian untuk men	Deskriptif Kualitatif	Hasilnya menunjukkan bahwa kepala kampung dalam melaksanakan tugasnya telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya seperti keteladanan, disiplin, pengawasan, motivasi, dan kerjasama,	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada tujuan, metode, dan hasilnya. Sedangkan dalam penelitian ini, tujuan penelitian adalah mengukur kinerja kepala kampung dari aspek motivasi kerja, situasi kerja dan disiplin kerja

Sumber : Olahan Penulis, Mei 2024

1.5.2. Konsep dan Teori

1.5.2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari kata “*performance*” yang berarti hasil kerja atau prestasi kerja. Kinerja juga dapat dimengerti sebagai suatu kegiatan dan menyempurnakan sesuai dengan tanggungjawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan. Jadi, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika. (Sinambela L. P., 2018)

Ivancevich (Ivancevich, 2006) mengatakan bahwa kinerja merupakan bukti pencapaian seseorang atas apa yang dikerjakan dan juga merupakan hasil capaian karena jabatan yang disandangnya. Sementara (SP.Siagian, 1997) mengatakan bahwa kinerja merupakan tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu.

Sedangkan menurut T.R Mitchell (dalam Sedarmayanti, 2009a) menyebutkan bahwa untuk mengukur kinerja setidaknya ada beberapa aspek yang perlu disoroti, yaitu : kualitas kerja (*quality work*), Ketepatan waktu (*Promptness*), Inisiatif (*inisiative*), Kemampuan (*capability*), dan *communication* atau komunikasi. (Sedarmayanti, 2001). Dari banyaknya pengertian tentang kinerja maka dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja seseorang yang menunjukkan kemampuan dan kapasitasnya dirinya dalam mencapai sesuatu yang menjadi standar atau ukuran atau tujuan.

1.5.2.2.Konsep Kinerja Kepala Kampung

Kinerja Kepala Kampung dapat dipahami sebagai hasil kerja atau prestasi kerja yang dicapai oleh seorang kepala kampung. Umumnya seorang kepala kampung adalah seseorang pribadi yang dianggap memiliki kemampuan kerja, kapasitas diri, relasi yang baik dengan semua orang bahkan memiliki kemampuan lain yang bisa diandalkan sebagai seorang pemimpin. Itu sebabnya dalam bagian ini, Kinerja kepala kampung dapat dipahami sebagai hasil capaian atau prestasi kerja yang ditunjukkan oleh seorang kepala kampung.

1.5.2.3.Pengertian Motivasi

Dalam sebuah organisasi motivasi memegang peran cukup penting terhadap keberhasilan organisasi mencapai tujuan. Artinya bahwa tujuan organisasi dapat saja dengan lebih mudah dicapai karena tugas seorang pemimpin perlu memberi motivasi kepada bawahannya sehingga tujuan pencapaian itu dapat dicapai. Itu sebabnya, Mangkunegara, menyebutkan bahwa motivasi adalah suatu kecenderungan untuk beraktifitas yang diawali dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri dengan penyesuaian diri. (Mangkunegara, 2017)

Dalam sebuah organisasi, seseorang pemimpin selalu dituntut kemampuannya untuk memberikan motivasi kepada bawahannya apabila mengharapkan bawahannya bekerja dengan semangat penuh. Apabila pemimpin tidak memiliki kemampuan untuk menggerakkan motivasi bawahannya maka sulit diharapkan untuk mendapatkan pegawai sebuah perusahaan untuk bekerja efektif, efisien dan penuh dengan kesadaran yang tinggi. (Mangkunegara, 2017)

Sementara itu, pada dasarnya seorang pegawai yang bekerja umumnya untuk memenuhi kebutuhan hidup maupun kebutuhan penunjang lainnya. Artinya dengan bekerja mereka berharap agar semua kebutuhannya dipenuhi secara maksimal. Proses pemenuhan menuntut seorang pegawai atau anggota organisasi untuk meningkatkan dan mempertahankan semangatnya dalam bekerja. Di sinilah, pentingnya motivasi sebagai daya dorong untuk mempertahankan semangat kerjanya sehingga hal itu dapat dimaknai sebagai motivasi yang menggerakkan seseorang untuk bekerja. Jadi motivasi itu bukan saja dari dalam dirinya (hasrat yang mendorong seseorang untuk semangat bekerja) tetapi ada juga dorongan dari pimpinan organisasi agar anggotanya lebih bersemangat untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. (Rivai, 2015)

Mangkunegara (2017) yang dikutip Candra Pranata Manihuruk; Satria Tirtayasa dalam Jurnal MANEGGIO Jurnal Magister Manajemen vol 3 No.2, September 2020 menyebutkan indikator motivasi kerja terdiri dari beberapa aspek, yaitu, kerja keras, orientas masa depan, tingkat cita-cita yang tinggi, orientasi tugas, usaha untuk maju, ketekunan, rekan kerja yang dipilih, dan pemanfaatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. (Manihuruk & Tirtayasa, 2020)

1.5.2.4. Pengertian Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar pegawai yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugasnya. Hal utama yang harus diupayakan untuk memperbaiki kinerja pegawai adalah menjamin agar pegawai dapat melaksanakan tugasnya tanpa mengalami ketegangan-ketegangan atau dengan kata lain unit kerja harus menyediakan lingkungan kerja yang baik bagi pegawainya.

Menurut (Sedarmayanti, 2017) lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok. Sumamur dalam Wahyudi dan Suryono (2016, hal. 5) berpendapat bahwa lingkungan kerja yang terkait dengan kemampuan manusia dan produktivitas kerja dipengaruhi oleh faktor fisik, kimia, biologis, fisiologis, mental, dan sosial ekonomi.

1.5.2.5. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. (UU No 6 tahun 2014).

Pasal 3 UU No 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dilakukan dengan menggunakan asas-asas sebagai berikut : a. rekognisi; b. subsidiaritas; c. keberagaman; d. kebersamaan; e.

kegotongroyongan; f. kekeluargaan; g. musyawarah; h. demokrasi; i. kemandirian; j. partisipasi; k. kesetaraan; l. pemberdayaan; dan m. keberlanjutan.

1.5.2.6. Arti Pelayanan Publik

Pada dasarnya, aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat mempunyai tugas pokok yang tercermin dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan adalah kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan (Lukman, 2004) dalam (Badu, 2018).

Zauhar (2001) menyebutkan pelayanan publik merupakan suatu upaya membantu atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang atau memberi manfaat kepada publik melalui penyediaan barang dan atau jasa yang diperlukan oleh mereka. Pelayanan publik yaitu semua barang dan jasa publik yang diatur dan diselenggarakan oleh pemerintah kepada warga negara. (Badu, 2018)

Keputusan Mampan No. 63/kep/m.pan/7/2003 mendefinisikan pelayanan publik sebagai segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(Badu, 2018) menyebutkan bahwa sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus

pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan ciri-ciri antara lain :

1. Lebih fokus kepada fungsi pengaturan, melalui berbagai kebijakan yang memfasilitasi perkembangan kondisi yang kondusif bagi kegiatan pelayanan oleh masyarakat.
2. Lebih memfokuskan diri kepada pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap fasilitas pelayanan yang berkualitas.
3. Menerapkan sistem kompetisi dalam hal penyediaan pelayanan publik tertentu sehingga masyarakat memperoleh pelayanan yang berkualitas.
4. Terfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran atau berorientasi pada hasil (*outcomes*) yang sesuai dengan *input* yang digunakan
5. Lebih mengutamakan apa yang diinginkan oleh masyarakat
6. Dalam hal tertentu, pemerintah juga berperan untuk memperoleh pendapat dari pelayanan yang dilaksanakan
7. Lebih mengutamakan antisipasi terhadap permasalahan pelayanan
8. Lebih mengutamakan desentralisasi dalam pelaksanaan pelayanan
9. Menerapkan sistem pasar dalam memberikan pelayanan.

1.5.2.7. Pengertian Pembangunan Kampung

Berdasarkan UU No. 6 tahun 2014 tentang desa khususnya pasal 1 ayat 8 berbunyi :”Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Untuk

mewujudkan ketentuan peraturan perundang-undangan dibutuhkan peran pemerintah melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan. Oleh sebab itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata mengandalkan pemerintah karena peran seluruh komponen masyarakat juga mempengaruhi keberhasilan dari suatu pembangunan maka peran pemerintah adalah sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dalam penyediaan sarana dan prasarana publik. (Irawan, 2020)

1.5.2.8. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan adalah kata benda, sedangkan actionnya adalah kata kerja yaitu memberdayakan. Memberdayakan masyarakat adalah usaha meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sebelumnya tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan untuk memberikan daya (empowerment) atau kekuatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dikatakan sebagai usaha memandirikan, mengembangkan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. ini berarti bahwa pemberdayaan masyarakat adalah usaha memandirikan dan memampukan dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran terhadap potensi yang dimilikinya untuk lebih berdaya guna dan berhasil guna. (Afriansyah, 2023)

Dalam konteks implelementasi, konsep pemberdayaan sering pula disamakan artinya dengan pengembangan komunitas/masyarakat (community development) atau dikalangan organisasi masyarakat sipil ataupun NGO sering menggunakan terminologi CD dalam memberikan pendampingan atau penguatan masyarakat dalam berbagai kegiatan, baik yang terkait proses pengembangan masyarakat dan yang bertujuan memampukan masyarakat memenuhi kebutuhannya sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya. (Afriansyah, 2023)

Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki perspektif lebih luas. Dalam arah praksis, pemberdayaan masyarakat sering dirancang dengan pendekatan partisipatif. Sebagai contoh, pembangunan yang melibatkan masyarakat sering disebut dengan pendekatan partisipatif. Dalam pendekatan ini masyarakat tidak hanya dijadikan obyek pembangunan tetapi dijadikan subyek yang ikut menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan yang dilaksanakan. Masyarakat diberi kewenangan dan otoritas untuk merencanakan dan menentukan pilihan-pilihan secara aktif dalam proses yang devijalkan termasuk terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian hingga pemanfaatan hasil.

Dalam proses pemberdayaan, bukan hanya membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dimiliki harus dihasilkan atas jerih payahnya sendiri, yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain.

Menurut Moelijarto bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. (Afriansyah, 2023)

Pemberdayaan pada dasarnya berusaha untuk membangun potensi yang ada pada diri seseorang dengan memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi yang ada sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha yang terencana dan sistematis. serta pemberdayaan dapat dilihat dari setiap masyarakat yang memiliki potensi untuk dikembangkan

1.6. Kerangka Pikir

Dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, mengatur tentang proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Itu sebabnya Kepala desa atau disebut dengan nama lain (kampung kalau di Papua) memiliki tugas dan fungsi yang juga diatur dalam UU ini sehingga proses penyelenggaraan pemerintahan kampung akan lebih maksimal dan kesejahteraan rakyat yang diharapkan dapat dipenuhi dengan adanya kemampuan kepala kampung dalam meningkatkan kinerjanya sebagai pemimpin yang dapat menggerakkan aparatnya dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat dan dapat pula menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di Kampung Toegi Distrik Ilaga Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

Itu sebabnya dalam penelitian ini ada dua variabel yang penulis gunakan yaitu variabel Kinerja Kepala kampung dan variabel penyelenggaraan pemerintahan kampung. Variabel Kinerja Kepala Kampung diukur dari tiga aspek yaitu aspek motivasi kerja, aspek situasi atau lingkungan kerja, dan aspek disiplin kerja sedangkan faktor-faktor penghambat menjadi bagian yang akan penulis jadikan sebagai temuan dalam penelitian ini. Sementara variabel penyelenggaraan pemerintahan Kampung dapat diukur dari aspek pelayanan publik, aspek pembangunan kampung dan aspek pemberdayaan kampung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



Gambar 01
Kerangka Pikir Penelitian

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : Metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena berkaitan dengan peristiwa- peristiwa yang sedang berlangsung dengan kondisi saat ini. Bogdan dan Taylor yang dikutip (Moleong, 2001) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku sosial yang diamati.

1.7.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak, Provinsi Papua Tengah.

1.7.3. Informan Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi, maka peneliti akan berupaya untuk mewawancarai orang-orang yang dipandang memiliki kecakapan atau kemampuan termasuk kewenangan untuk memberikan informasi kepada penulis. Sehingga untuk mendapatkan data dan keterangan, penulis menentukan informan terpilih dan menghubungi secara terpisah untuk menyampaikan tujuan penelitian sekaligus meminta kesediaan waktunya. Oleh sebab itu, informan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut :

- Kepala Kampung Toegi, Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak

- Sekretaris Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara, Kabupaten Puncak
- Aparat Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak
- Ketua Bamuskam Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak
- Tokoh Masyarakat Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak
- Tokoh Pemuda Kampung Toegi Distrik Ilaga Utara Kabupaten Puncak

1.7.4. Fokus Penelitian

Agar penelitian ini lebih baik dan data dapat dikumpulkan sesuai dengan tujuannya, maka penulis fokuskan pada dua variabel utama, yaitu:

- Kinerja Kepala Kampung dengan indikatornya motivasi kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja.
- Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dengan indikator atau aspek-aspek yang diteliti adalah pelayanan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

1.7.5.1. Observasi

Observasi adalah mengamati secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian pada lokasi atau tempat penelitian. Misalnya penulis akan mengamati beberapa aspek seperti aktivitas manusia, situasi lokasi penelitian, dan kinerja kepala kampung Toegi dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kampung Toegi.

1.7.5.2. Wawancara`

Teknik pengumpulan data melalui interviuw atau wawancara merupakan metode yang penulis gunakan untuk mendapatkan data atau keterangan secara lisan dari seseorang yang disebut informan penelitian melalui proses tanya jawab yang berlangsung secara sistematis dan teratur. Untuk melakukan wawancara, penulis menyiapkan panduan wawancara yang dibuat berdasarkan variabel dan indikator penelitian yang tergambar dalam kerangka pikir.

1.7.5.3.Dokumentasi

Dokumentasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI bahwa dokumentasi adalah pengumpulan pemilihan ,pengolahan dan penyimpanan informasi dalam bidang pengetahuan. Selain itu, dokumentasi juga diartikan sebagai pemberian atau pengumpulan bukti dan keterangan (seperti gambar kutipan, guntingan koran, dan bahan bahan referensi lain yang dapat digunakan sebagai data dan informasi dalam penelitian ini (Sugiyono, 2009). Data-data dari dokumen-dokumen ini, selanjutnya akan penulis kumpulkan dan dianalisis dan dimanfaatkan sesuai kebutuhan penelitian.

1.7.6. Teknik Analisis Data.

Dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif umumnya data dianalisis sejak awal penelitian, hal ini sangat berbeda dengan penelitian dengan pendekatan kuantitatif yang akan menganalisis datanya setelah semua kuisioner terkumpul. Penelitian dengan pendekatan kualitatif, data dianalisis, sejak desain awal dengan pola data yang ada dianalisis dengan memanfaatkan model interaktif yang disampaikan Miles dan Huberman seperti dikutip (Sugiyono, 2009) dimana data

dikumpulkan, lalu ditampilkan (display data), kemudian diverifikasi, lalu penarikan kesimpulan. Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pengumpulan data hal pertama yang perlu dilakukan peneliti tentunya mengumpulkan data berdasarkan pernyataan atau permasalahan sudah dirumuskan .direduksi dan kategorisasi, kemudian .
- Data ditampilkan untuk melihat apakah data dan informasi sudah sesuai dengan kebutuhan penelitian. Apabila telah memenuhi kebutuhan
- Penarikan Kesimpulan. Setelah semua data terkumpulkan dan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian maka langsung dibuat kesimpulan.